



---

## Re-Interpretasi Buku Teks Sejarah Indonesia: Kritik terhadap Narasi Nasionalisme Sejarah

Samudra Eka Cipta

Departemen Pendidikan Sejarah Universitas Pendidikan Indonesia  
Jalan Setiabudi No. 229 Bandung  
[samudra.eka@student.upi.edu](mailto:samudra.eka@student.upi.edu)

---

Naskah diterima: 19 Februari 2020, direvisi: 1 Maret 2020, disetujui: 29 Mei 2020

---

### Abstract

*The research was examined to examine the relevance of nationalism which has been widely narrated in high school's history textbook in Indonesia. The author also criticised the development of Indonesia's history textbook on government viewpoints. This research will discuss many of the problems. Certainly the essence of Historical Education is how efforts to increase the values of nationalism are presented in the form of historiography. This research has problem formulation which consists of (1) how is the development of historiography in Indonesia?, (2) how is nationalism related to history textbooks, (3) how is the concrete form of nationalism in historical education?*

**Keywords:** *Nationalism, Text Books, History, Indonesian*

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji keterkaitan nasionalisme yang banyak dinarasikan pada Buku Teks Sejarah Indonesia di SMA. Penulis juga melakukan kritik terhadap perkembangan buku teks Sejarah Indonesia terhadap sudut pandang pemerintah. Penelitian ini akan membahas banyak permasalahan diantaranya. Tentu saja esensi pendidikan sejarah adalah bagaimana upaya peningkatan nilai nasionalisme disajikan dalam bentuk historiografi. Penelitian ini memiliki perumusan masalah yang terdiri dari (1) bagaimana perkembangan historiografi di Indonesia?, (2) bagaimana nasionalisme yang berkaitan dengan buku teks sejarah, (3) bagaimana bentuk konkret nasionalisme dalam pendidikan sejarah?

**Kata kunci:** Nasionalisme, Buku Teks, Sejarah, Indonesia

## PENDAHULUAN

Perjalanan Bangsa Indonesia sudah dimulai sejak masa sejarah yang berarti masa dimana Bangsa Indonesia sudah mulai mengenal tradisi tulisan sebagai upaya untuk merekam sejarah leluhurnya. Perkembangan Bangsa Indonesia terus mengalami dinamika pada setiap periodisasinya. Dari dinamika tersebut kemudian ada sebuah usaha untuk memperkuat dan mempersatukan Bangsa Indonesia melalui nasionalisme. Nasionalisme di Indonesia dimulai sejak tahun 1901-1920 atau dikenal sebagai Masa Awal Pergerakan Indonesia dengan ditandainya organisasi pergerakan baik yang memiliki orientasi pada pendidikan maupun politik. Sejarah Nasionalisme di Indonesia tidak terbatas pada Era Pergerakan namun terus bergerak hingga saat ini. Pendidikan sejarah lahir dan berangkat melalui Sejarah Perkembangan Bangsa Indonesia. Tentunya dalam historiografi Bangsa Indonesia penuh dengan catatan-catatan perjuangan bagaimana para tokoh pendiri bangsa memperjuangkan untuk mendirikan Republik Indonesia melalui pertumpahan darah. Tentunya esensi dari Pendidikan Sejarah bagaimana upaya peningkatan nilai-nilai nasionalisme disajikan dalam bentuk historiografi. Hal tersebut jika mengutip pernyataan dari Soekarno *“bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya”* sebagai asumsi bahwa pentingnya untuk mempelajari sejarah selain untuk mempelajari awal sejarah Indonesia juga mempelajari perjuangan Bangsa Indonesia dalam mendirikan Republik

Indonesia dengan berbagai dinamikanya terutama masih sangat dipengaruhi unsur politik dalam mewarnai Sejarah Indonesia.

Salah satu esensi dari pendidikan sejarah bagi kepentingan negara yakni meningkatkan rasa nasionalisme dengan memasukkan peristiwa-peristiwa bersejarah yang bersifat politis dan dipenuhi sejarah konflik politik terutama dari Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945-1949) hingga Masa Reformasi (1998-sekarang). Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai aset untuk mempertahankan negara sebagai bagian dari konsep geostrategi yang dibangun untuk membangun memori kolektif bangsa.

Salah satu esensi pendidikan sejarah bagi kepentingan negara adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan menyertakan peristiwa sejarah yang bersifat politis dan penuh dengan sejarah konflik politik, terutama dari periode revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949) sampai dengan periode reformasi (1998-sekarang). Hal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai aset untuk membela negara sebagai bagian dari konsep geostrategis yang dibangun untuk membangun memori kolektif bangsa.

Buku teks sejarah nasional Indonesia dalam era orde baru mengandung banyak unsur politik berdasarkan supremasi kekuasaan'. Pemerintah menerbitkan buku tentang sejarah nasional Indonesia yang terdiri dari jilid 1-6. Buku ini sekarang menjadi acuan dalam materi pelajaran sejarah di sekolah. Seluruh isi atau materi yang disajikan dalam buku pelajaran sangat melegalkan

peran dominan pemerintahan Orde Baru serta bentuk ' Desukarnoization ' sehingga peran Orde Baru lebih dominan daripada peran Sukarno dalam pengembangan historiografi di Indonesia. Apalagi ketika Nugroho menjabat sebagai kepala tim persiapan buku sejarah nasional Indonesia, yang membuatnya indoktrinasi pemerintah dalam buku pelajaran. Tidak semua peristiwa yang terjadi selama bertahun-tahun 1960-1967 sampai awal pemerintahan Orde Baru dimasukkan sebagai pokok bahasan dalam buku pelajaran. Sebagai contoh, peristiwa konfrontasi Malaysia Malaysia yang terjadi pada tahun 1962 tidak termasuk dalam materi karena mereka hanya propaganda blok Timur ketika Soekarno menentang pengaruh Inggris di Semenanjung Malaya sementara pada kenyataannya untuk Orde Baru peristiwa ini adalah kepentingan Uni Soviet. Bukti lain dari legitimasi kekuasaan Orde Baru melalui buku teks sejarah nasional Indonesia adalah ketika integrasi Timor Leste pada tahun 1975 ditandai dengan deklarasi Balibo yang mengindikasikan bahwa Orde Baru telah memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Timor Leste. Orang Timor Timur pada waktu itu menyebutnya Balibo (Hong) Deklarasi karena dianggap penuh rekayasa oleh intelijen Orde Baru. Pemerintah Orde Baru yang pada saat itu menggemakan rencana pengembangan lima tahun ' Repelita ' juga ditulis secara luas dalam buku teks sejarah nasional Indonesia (Budiono & Awaludin, 2017: 40).

Dalam sudut pandang lain, bahwa nasionalisme hanya menjadi slogan dalam

tulisan. Faktanya memang, tidak semua orang memahami makna dari nasionalisme. Jika mengambil konsep ke-Indonesiaan menurut Nurcholis Madjid yang mengatakan bahwa antara agama dengan toleransi merupakan sesuatu yang bisa dipersatukan. Sebagai contoh ketika Masyumi pada tahun 1960 mencoba untuk mengambil langkah pembentukan gerakan Pan-Islamis di Indonesia namun, kemudian ditentang oleh Soekarno sehingga Masyumi diberhentikan status kepartaiannya. Atas dasar itulah Cak Nur panggilan dari Nurcholis Madjid mengemukakan gagasan "Islam Yes, Partai Islam No". Sejatinya apa yang digagas oleh Nurcholis Madjid memiliki maksud bahwa sesuatu yang dianggap sakral (dalam arti berkenaan dengan masalah akidah Ke-Islaman) tidak harus dijadikan sebagai landasan dalam politik bernegara. Hal tersebut jika mengulas perkembangan politik di Indonesia sejak masa DI/TII hingga Masa Orde Baru terus terjadi pertentangan antara nasionalis-islam. Sehingga keduanya terus berupaya untuk mendapatkan eksistensi politik dalam perkembangan Sejarah Indonesia.

Cak Nur merupakan sekian ilmuwan yang dapat mengerti konsep nasionalisme serta bagaimana pandangan mengenai kebanyakan orang mengenai hubungan agama dengan nasionalisme merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang. Nasionalisme sejatinya dapat disatukan dalam agama tergantung konteks dan kebutuhan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan suatu nasionalisme.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode studi konten isi yakni dengan menggunakan pendekatan studi literatur dari beberapa sumber dengan mengkaji beberapa temuan berupa pengumpulan buku-buku sebagai sumber referensi sekaligus membandingkan sumber pada pembahasan ini. Penulis juga menggunakan metode historis untuk melihat perkembangan pembelajaran sejarah di Indonesia dengan melihat peristiwa bersejarah di Indonesia. Menurut Helius Sjamsuddin, mengatakan bahwa metode historis diawali dengan tahapan pengumpulan data, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah sebagai kerangka berpikir dalam suatu penelitian yang sifatnya historis (Sjamsuddin, 2015: 44).

Menurut Klaus Krippendorff (1991), analisis isi bukan sekadar menjadikan isi pesan sebagai objeknya, melainkan juga terkait dengan konsepsi-konsepsi yang lebih baru tentang gejala-gejala simbolik dalam dunia komunikasi. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi atau keterangkapan yang dapat ditiru (replicable) dan sah datanya dengan memperhatikan konteksnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Historiografi dari Nerlandosentris menuju Indonesiasentris

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, perkembangan penulisan sejarah telah menemui babak baru. Faktor politis telah menyebabkan berubahnya corak kepenulisan

sejarah menuju ke-Indonesiaan. Hal tersebut dikarenakan sejak masa Kependudukan Kolonial Belanda corak historiografi masih sangat mengacu kepada masalah kependudukan di Indonesia. Perkembangan historiografi Indonesia Modern dimulai pada tanggal 14-18 Desember 1957, ketika itu kementerian pendidikan mengadakan Seminar Nasional Sejarah yang pertama di Yogyakarta untuk merancang sejarah nasional yang resmi. Pembangunan nasional adalah salah satu tema utama pada tahun 1950-an dan penulisan sejarah nasional adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses ini. Seminar itu membicarakan tentang usaha penulisan sejarah nasional yang berpandangan Indonesia sentris. Sejarah nasional diharapkan menjadi alat pemersatu dengan memberikan penjelasan tentang keberadaan bangsa Indonesia melalui jejak sejarahnya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ditulis oleh orang Indonesia sendiri, dengan demikian tentu objektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan karena yang menulis sejarah adalah orang yang berada pada saat peristiwa tersebut terjadi atau setidaknya adalah orang Indonesia asli.

Disisi lain, jauh sebelum diadakannya Seminar Nasional Sejarah I usaha memunculkan penulisan sejarah Indonesentris sudah ada ketika adanya suatu disertasi karya Husein Djadjadiningrat seorang Bupati Serang dan pernah menjadi muridnya Snouck Hurgronje. Disertasi yang dikaji oleh Husein Djadjadiningrat ketika akan diujian sidangkan di Universitas Leiden. Salah satu disertasi karya Husein yakni

*Critische Beschouwing van de Sadjarah Banten* (1913) yang mengkaji tentang masalah penulisan sejarah Banten. Pada penulisan sejarah Banten Husein melihat bahwa masih adanya corak penulisan yang bersifat Nerlandosentris. Sebagai contoh buku *Max Havelaar* (1860) karya Multatuli yang menceritakan nasib penderitaan pribumi namun buku tersebut juga menjelaskan keterlibatan Pemerintah Kolonial dalam menyelamatkan nasib penduduk Banten dengan menerapkan Politik Balas Budi. Politik Etis dilakukan dengan cara memperbolehkan kaum pribumi untuk memperoleh pendidikan. Awalnya tujuan diterapkannya Politik Etis dengan dua tujuan, tujuan yang nampak diluar adalah seolah-olah menembus kesalahan atas Politik Tanam Paksa yang dilakukan. Namun, dibalik itu, tujuan tersembunyinya, untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga administrasi tingkat rendah, yang idealnya tidak perlu dilakukan oleh "orang Belanda". Namun, cukup dilakukan oleh tenaga pribumi yang telah "disekolahkan".

Terlepas dari maksud diatas Pasca Seminar Nasional Sejarah I para sejarawan dan politikus bahu membahu menuliskan Sejarah Nasional Indonesia. Terdapat yang menarik dari dua tokoh yakni antara Mr. Muhammad Yamin dengan Sartono Kartodirdjo. Kedua tokoh tersebut memiliki latar belakang yang berbeda sehingga karya-karya yang berkenaan mengenai Sejarah Nasional Indonesia juga memiliki corak yang berebeda. Muhammad Yamin banyak menuliskan tentang Sejarah Indonesia salah

satu buku yang ditulisnya yakni berjudul *6000 Tahun Sang Merah Putih* (1951). Buku tersebut mengkaji tentang bagaimana sejarah perjalanan panjang Bendera Merah Putih sudah ada jauh sebelum Kemerdekaan Indonesia melainkan sejak Kerajaan Majapahit dengan menggunakan unsur warna "Merah Putih" sebagai lambang kerajaan tersebut. Bagi beberapa sejarawan Muh. Yamin dianggap selalu mengaburkan fakta dalam mengkonstruksikan Sejarah Indonesia. Tak keterkecuali ketika Muh. Yamin menggambarkan sosok patung Gadjah Mada yang hampir mmenyerupai dengan dirinya dan seolah-olah digambarkan sebagai sosok yang asli. Kemudian, Sartono Kartodirdjo menerbitkan sebuah karya mengenai Historiografi Indonesia dengan mengedepankan peran tokoh-tokoh lokal pada suatu peristiwa. Karya yang dimaksud adalah berjudul *Pemberontakan Petani Banten 1888* (1966) buku tersebut merupakan anti-tesis, yang ditulis Sartono sebagai kritik, terhadap historiografi kolonial yang Belanda-sentris; menekankan pada lembaga-lembaga pemerintah dan menganggap rakyat dan kaum tani memainkan peran pasif. Buku tersebut membangkitkan penulisan sejarah lokal, yang ternyata kompleks dan memiliki makna. Pendekatan multi-dimensional yang digunakan Sartono juga tidak kalah penting pada buku tersebut (Multatuli, 1860).

Pernyataan diatas dikatakan bahwa pada tahun 1950-1960 an merupakan awal Kebangkitan Penulisan Sejarah Indonesia dengan pendekatan ke-Indonesiaaan.

Namun, pada mula untuk merekonstruksi suatu peristiwa para sejarawan masih melihat mitologi sebagai peran besar dalam suatu gejolak masyarakat. Gerakan sosial yang dimaksud yakni masih terpengaruh oleh *Konsep Ratu Adil* yakni suatu konsep bahwa segala penderitaan akan hilang ketika munculnya seseorang yang mampu membebaskan dari belenggu penderitaan. Konsep ini dibangun sejak berabad-abad dan sering dipakai ketika hendak melakukan sebuah gerakan untuk melawan Pemerintah Kolonial Belanda karena dianggap sebagai sumber penderitaan bagi penduduk Bumiputera saat itu.

### **Analisis Buku Teks Sejarah Masa Orde Baru**

Masa Orde Baru merupakan masa terpenting dalam perkembangan historiografi khususnya pada Buku Teks Sejarah di sekolah. Pemerintah Orde Baru kemudian melakukan "proyek" pembuatan dan percetakan Buku Sejarah Nasional Indonesia yang terdiri dari 6 jilid dan berkerjasama melalui Balai Pustaka sebagai percetakan utama dalam penerbitan. Dalam proses penyusunan Buku SNI (Sejarah Nasional Indonesia) peran pejabat militer sangat diperlukan oleh pemerintah saat itu. Hal tersebut dengan penunjukkan Nugroho Notosusanto sebagai ketua dalam penyusunan Buku SNI. Berlatarbelakang ABRI Nugroho Notosusanto mampu menuliskan SNI dan mempunyai gaya penulisan yakni sangat menonjolkan peran ABRI dan Orba dalam penulisan buku teks sejarah di Indonesia.

Sosok Nugroho Notosusanto dianggap sangat kontroversial Nugroho bahkan mengkritiknya terang-terangan, sebut saja A. Surjomihardjo, Kuntowijoyo & Onghokham. Mungkin inilah yang menyebabkan Nugroho mendapatkan stigma sejarawan abal-abal karena kiprahnya yang menonjol & kontroversial dalam penulisan sejarah (versi) orba (Mulyana., 2013 : 83).

Penyebutan istilah Orde Baru dalam penulisan Sejarah Nasional Indonesia mencerminkan ada interpretasi kekuasaan. Terminologi Orde Baru menunjukkan bahwa Sejarah Nasional Indonesia adalah sejarah perjuangan. Perjuangan dimulai dengan jaman kolonial yaitu perjuangan yang penuh dengan perang dalam mengusir penjajah atau perjuangan antara kekuatan nasionalis melawan kolonial (penjajah). Hasil dari perjuangan ini melahirkan sebuah negara yang merdeka yaitu Republik Indonesia. Ketika Indonesia merdeka perjuangan belum selesai, timbul berbagai macam ancaman dan gangguan bagi eksistensi Negara Republik Indonesia. Gangguan dan ancaman itu baik dalam bentuk konflik fisik atau perjuangan bersenjata maupun pergolakan politik. Ancaman dan gangguan baik datang dari luar maupun dari dalam. Tantangan dari luar yaitu datangnya kembali Belanda yang ingin menjajah Indonesia sehingga terjadilah perang atau konflik bersenjata antara pihak Indonesia dengan Belanda. Periode ini dikenal dengan Periode Revolusi. Sedangkan ancaman dari dalam berupa pemberontakan-pemberontakan yang dianggap merongrong terhadap kedaulatan Republik Indonesia.

Pemberontakan-pemberontakan itu seperti PRRI/PERMESTA, PKI, DI/TII, RMS, dan sebagainya. Eksistensi Negara Republik Indonesia akhirnya dapat diselamatkan oleh suatu kekuatan yang kemudian membentuk pemerintahan yang disebut dengan Orde Baru. Kekuatan utama yang menjadi pendukung Orde Baru adalah militer. Dengan demikian pada masa Orde Baru terjadi militerisasi dalam sejarah (McGregore, 2008 : 51).

Sejarah Nasional Indonesia yang direkonstruksi oleh Orde Baru adalah Sejarah Nasional yang penuh dengan interpretasi kekuasaan. Penulisan Sejarah Nasional pada dasarnya merupakan promosi dari pemerintah, karena sejarah nasional terkait erat dengan legitimasi negara dan identitas nasional (Sutherland, 2008: 38). Orde Baru mencoba membuat satu identitas atau mendefinisikannya sendiri yaitu koreksi total atas penyelewengan-penyelewengan di segala bidang, dan berusaha menyusun kembali kekuatan Bangsa dan menentukan cara-cara yang tepat untuk menumbuhkan stabilitas nasional jangka panjang sehingga mempercepat proses pembangunan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan yang berlangsung sebelum Orde Baru diinterpretasikan sebagai suatu keadaan yang tidak lebih baik daripada pemerintahan Orde Baru bahkan diinterpretasi dengan kondisi yang kontraproduktif sehingga disebut dengan Orde Lama.

## Perkembangan Nasionalisme dan Konteksnya Dalam Buku Teks Sejarah

Dalam sejarah, Nasionalisme bermula dari benua Eropa sekitar abad pertengahan. Kesadaran berbangsa dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman. Nasionalisme Eropa pada awal kelahirannya menghasilkan deklarasi hak-hak manusia namun pada akhirnya berubah menjadi kebijakan yang didasarkan atas kekuatan dan *self interest* dan bukan atas kemanusiaan. Dalam perkembangannya Nasionalisme Eropa berpindah haluan menjadi persaingan fanatisme Nasional antar bangsa-bangsa Eropa yang melahirkan penjajahan terhadap negeri-negeri yang saat itu belum memiliki identitas kebangsaan (nasionalisme) di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Fakta ini merujuk pada dua hal:

1. Ledakan ekonomi Eropa pada masa itu yang berakibat pada melimpahnya hasil produksi.
2. Pandangan pemikir Italia, Nicolo Machiaveli, yang menganjurkan seorang penguasa untuk melakukan apapun demi menjaga eksistensi kekuasaannya. Dia menulis: "Bila ini merupakan masalah yang mutlak mengenai kesejahteraan bangsa kita, maka janganlah kita menghiraukan keadilan atau ketidakadilan, kerahiman atau ketidakrahiman, pujian atau penghinaan, akan tetapi dengan menyisihkan semuanya menggunakan siasat apa saja

yang menyeleamatkan dan memelihara hidup negara kita.”

Nasionalisme yang pada awalnya mementingkan hak-hak asasi manusia pada tahap selanjutnya menganggap kekuasaan kolektif yang terwujud dalam negara lebih penting daripada kemerdekaan individual. Pandangan yang menjadikan negara sebagai pusat merupakan pandangan beberapa pemikir Eropa saat itu, diantaranya Hegel. Dia berpendapat bahwa kepentingan negara didahulukan dalam hubungan negara masyarakat, karena ia merupakan kepentingan obyektif sementara kepentingan masing-masing individu adalah kepentingan subyektif (Sutherland, 2008:38).

Di Indonesia sejarah nasionalisme terjadi pada tahun 1901-1920 sebagai awal munculnya berbagai organisasi pergerakan di Indonesia. Menurut Kahin (2013: 322), mengatakan bahwa Masa Pergerakan selain masa dimana awal kebangkitan untuk melawan sistem Pemerintah Kolonial, Masa Pergerakan dikenal sebagai bentuk pertarungan ideologi beserta eksistensi terutama antara gerakan reformis nasionalis dengan gerakan pan islamisme sebagai kekuatan tandingan dalam mewujudkan masa pergerakan di Indonesia. Masa awal pergerakan nantinya akan menjadi babak baru dalam penulisan historiografi di Indonesia seiring dengan kesadaran akan pembentukan entitas dan jati diri bangsa dengan didukungnya oleh ilmu pengetahuan.

Kemudian, rezim menggunakan institusi pendidikan sebagai upaya untuk

mempertahankan kekuasaan dengan dibentuknya “aparatus” pendidikan. Kekuasaan yang dibangun adalah ideologi-ideologi yang dimasukkan ke dalam kurikulum yang dibuat. Satu dari sekian praktek ideologisasi negara melalui aparat pendidikan, berkenaan dengan aspek ideologi dan legitimasi historis itu, tampak dalam bentuk buku teks pelajaran sejarah. Sebagai sebuah karya tulis sejarah, buku teks pelajaran sejarah pun adalah karya historiografi. Namun, berbeda dengan jenis historiografi lainnya terutama historiografi yang berorientasi kesejarahan semata-mata dan tanpa maksud politik pendidikan historiografi buku teks pelajaran sejarah merupakan genre historiografi, yang berusaha memenuhi standar ilmu sejarah sekaligus untuk kepentingan pendidikan sekaligus medium ideologisasi negara terhadap peserta didik (Notosusanto, 1987: 173).

Lebih jauh dia menyatakan bahwa negara memegang monopoli untuk menentukan apa yang benar dan salah mengenai hakikat negara, menentukan apa yang moral dan yang bukan moral, serta apa yang baik dan apa yang destruktif (Simandjuntak, 2003:166). Hal ini melahirkan kecenderungan nasionalisme yang terlalu mementingkan tanah air (patrotisme yang mengarah pada chauvinisme), yang mendorong masyarakat Eropa melakukan ekspansi-ekspansi ke wilayah belahan dunia lain.

## Pembelajaran Sejarah Sebagai Pembentukan Jati Diri Bangsa

Belajar sejarah merupakan pintu untuk memelajari dan menemukan hikmah terhadap apa yang sudah terjadi. Belajar sejarah adalah belajar tentang kemanusiaan dalam segala aspeknya. Belajar sejarah akan melahirkan kesadaran tentang hakekat perkembangan budaya dan peradaban manusia, hasil belajar inilah yang kemudian dikenal sebagai kesadaran sejarah (*historical consciousness*). Jadi tujuan belajar sejarah salah satunya adalah melahirkan kesadaran sejarah. Dengan demikian, proses pembelajaran sejarah di sekolah juga harus didorong untuk menciptakan situasi yang dapat menumbuhkembangkan kesadaran sejarah (Mulder, 2007) (dalam Suwirta, 2010: 243)

Sejarah tidak terlepas dari masalah kekuasaan, politik, konflik, dan sebagainya. Namun dewasa ini, penulisan sejarah sangat mengedepankan aspek sosial dan lokalitas. Aspek lokalitas yang dibangun yakni aspek kelokalan yang dengan mengedepankan tokoh-tokoh sosial yang tinggal atau memiliki peran dalam suatu peristiwa di wilayahnya. Maka yang dikenal saat ini adalah sejarah lokal merupakan suatu perjanjian antara penulis dengan kelompok-kelompok sosial yang terbatas pada *locally*, atau aspek geografis yang terbatas (Althusser, Louis. t.t: 66).

Disisi lain, sejarah lokal juga melibatkan aspek perantara sosial dan budaya sebagai pembentukan suatu peristiwa pada daerah tertentu. Sejatinya, sejarah lokal

kesatuan wilayah dengan melibatkan perkembangan kelompok masyarakat dari suatu lingkungan tentunya mengalami perubahan yang disertai oleh dinamika tertentu.

Pembelajaran sejarah harus menggunakan pendekatan lokosentris, yakni pembelajaran sejarah dengan berpijak pada sejarah lokal. Guru harus memahami prinsip paralelisme waktu dalam penyajikan peristiwa, dan juga harus memahami sejarah lokal. Dengan demikian, guru akan selalu menghubungkan peristiwa nasional dengan peristiwa di daerah tempat dia bertugas. Misal, ketika membahas Peristiwa Proklamasi, maka guru harus juga menjelaskan pada saat yang bersamaan di daerah dia bertugas terjadi apa. Keterkaitan materi dan pembahasan akan melibatkan tidak hanya pikiran tetapi juga emosional, sehingga akan melahirkan kesadaran adanya kesinambungan sejarah masa lalu dengan apa yang terjadi sekarang.

## Tantangan Pembelajaran Sejarah Saat Ini

Di masa era Reformasi selepas Masa Orde Baru penulisan sejarah pada buku teks sejarah terus terpengaruh kepentingan politik. Hal tersebut diungkapkan oleh Niels Mulder seorang sejarawan Belanda mengatakan bahwa penulisan buku sejarah sejak Masa Orde Baru lebih mencerminkan pemikiran ideologis sekarang ini. Mata-mata pelajaran seperti sejarah, kewarganegaraan, dan pendidikan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) lainnya seperti Sosiologi, Antropologi, dan Ekonomi di sekolah adalah wilayah yang rentan terhadap

pengaruh ideologi dan kepentingan politik pemerintah. Sebenarnya, kesemua itu dikonstruksi oleh pemerintah guna mempertahankan bagian dari *geostrategi* sebagai untuk mempertahankan kekuasaan dan negara (Abdullah, 1996 : 15).

Perubahan kurikulum yang dilakukan secara terus menerus juga menimbulkan masalah baru bagi pengembangan penulisan sejarah yang disesuaikan dengan KD (Kompetensi Dasar) dan IPK (Indikator Ketercapaian Kompetensi) membuat para guru terutama AGSI (Asosiasi Guru Sejarah Indonesia) harus bekerja keras dalam menyusun kurikulum pembelajaran sejarah. Terlebih, beberapa waktu lalu sempat dihebohkan dengan wacana pemerintah menghapuskan pelajaran sejarah karena dianggap kuno. Tentunya wacana tersebut sangat menimbulkan kecemasan terutama dialami guru sejarah sehingga dapat mengancam keprofesian guru sejarah tersebut. Meskipun wacana tersebut tidak sampai benar-benar terjadi dan guru sejarah tetap melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing (Kasim, 1992: 50).

Jika mengutip filsafat "*Historia Vitae Magistra*" yang artinya sejarah adalah guru kehidupan pembelajaran sejarah memiliki tujuan ideal yakni sebagai upaya untuk memperbaiki kehidupan bangsa dan negara yang diawali dengan suatu kelompok masyarakat tanpa adanya campur tangan kekuasaan dan kepentingan politik sehingga mengurangi esensi pendidikan sejarah sebagaimana mestinya.

## SIMPULAN

Pembelajaran sejarah sejatinya meningkatkan pemahaman nasionalisme terlepas dari upaya kepentingan politik yang dibangun oleh penguasa guna membentuk memori kolektif Bangsa Indonesia. Narasi yang dibuat adalah narasi yang sifatnya ideologis. Narasi sejarah yang diisi fakta secara kronologis dan tafsiran sejarah yang bersifat mendidik itulah yang disebut sebagai "ideologisasi", yaitu mentransmisikan ideologi atau pandangan pemerintah terhadap para peserta didik di sekolah, sehingga pandangan para peserta didik akan sama, sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah yang berkuasa.

Bukan hanya saja pada tataran narasi namun pada kurikulum yang dibentuk juga sangat bermuatan politis sehingga ada anggapan bahwa ganti kepemimpinan maka ganti pula kurikulum yang membuat pelajaran sejarah harus "menyesuaikan" dengan kepentingan para penguasa selama menjabat. Hal ini yang sebenarnya dapat menghilangkan citra atau esensi utama dari pembelajaran sejarah sebagai guru pengalaman guna merubah kesuatu hal baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, H., & Awaludin, A. F. (2017). *Perkembangan Historiografi Buku Teks Sejarah Di Indonesia Masa Orde Baru Hingga Reformasi*. 1(1), 36–43.
- Abdullah, T. (1996). *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ahmad, Abdul, R & Suwirta, A. (2007). *Sejarah dan Pendidikan Sejarah Prespektif*

- Indonesia dan Malaysia. Bandung: Historia Utama Press.
- Althusser, Louis. (t.t.). *Tentang Ideologi: Marxisme, Strukturalis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta: Penerbit Jalasutra, Terjemahan.
- Anderson, B. (1983). *Immaginaed Communities, Reflection on the Origin Spread of Nationalism*. London. London: The Thetford Press, Ltd.
- Hamidulloh, Ibd. (2018). Cak Nur, Nasionalisme, dan Toleransi Suara Nahdiyin  
<http://suaranahdliyin.com/cak-nur-nasionalisme-dan-toleransi-3201>  
(Dikunjungi 14 Maret 2020)
- Hasan, S. Hamid. (1996). *Pendidikan Ilmu Sosial*. Jakarta: Departemen Pendidikan Kebudayaan.
- Kadir, Abdul dkk. (2012). *Dasar-dasar Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Kahin. (2013). *Nasionalisme & revolusi Indonesia terjemahan*. Jakarta: Bambu.
- McGregore, Katharine E, (2008), *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer Dalam Menyusun Sejarah Indonesia*, Yogyakarta: Syarikat Indonesia.
- Kasim, Sultan. (1992). *Beberapa Catatan tentang Pengajaran Sejarah di SMA. Majalah Sejarah*. Jakarta: Gramedia & Masyarakat Sejarawan Indonesia.
- Kripendoff, Klaus. (1991). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta: Rajawali Press, Terjemahan.
- Mulyana, Agus. (2013). *Nasionalisme Dan Militerisme: Ideologisasi Historiografi Buku Teks Pelajaran Sejarah Sma. Paramita: Historical Studies Journal*, 23(1). 78-87  
<https://doi.org/10.15294/paramita.v23i1.2498>
- Notosusanto, N. (1987) *Sejarah dann sejarawan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nordholt, Henk Schulte et, al. (2008). *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, Jakarta : Obor
- Simandjuntak, Marsillam. (2003). *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Utama Gafitr.
- Suwirta, A. (2010). *Dua Negara-Bangsa Melihat Masa Lalunya : Konfrontasi Indonesia – Malaysia ( 1963-1966 ) sebagaimana Dikisahkan dalam Buku-buku Teks Sejarahnya di Sekolah*. 3(229), 243–258.
- Suprayogo, Tobroni, I. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja.
- Widja, G. (1991). *Sejarah lokal suatu prespektif dalam pengajaran sejarah*. Bandung: Angkasa
- Wiriaatmadja, Rochiati. (2000). “Sejarah dan Pendidikan Sejarah Menghadapi Tantangan Abad ke-21” dalam *HISTORIA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol.1(1), Juni. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia].
- Yamin, M. (1951). *6000 Tahun Sang Merah Putih*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yatim, Badri. (2001). *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*. Bandung: Nuansa.